

PENGARUH UPAH MINIMUM, INVESTASI, DAN PENGELUARAN PEMERINTAH TERHADAP TINGKAT PENGANGGURAN KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI BALI

Putu Ayu Leonita Aryanti ¹

A.A. I. N Marhaeni ²

^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali,
Indonesia

Email: leonitaaryanti@gmail.com

ABSTRAK

Tingkat pengangguran yang tinggi menyebabkan masyarakat tidak dapat memaksimalkan kesejahteraannya, hal ini terjadi di setiap daerah salah satunya di Provinsi Bali. Penelitian ini bertujuan: (1) Untuk menganalisis pengaruh simultan upah minimum, investasi, dan pengeluaran pemerintah terhadap tingkat pengangguran Kabupaten/Kota di Provinsi Bali, (2) Untuk menganalisis pengaruh parsial upah minimum, investasi, dan pengeluaran pemerintah terhadap tingkat pengangguran Kabupaten/Kota di Provinsi Bali, (3) Untuk menganalisis peran upah minimum dalam memoderasi pengaruh investasi dan pengeluaran pemerintah terhadap tingkat pengangguran Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Penelitian ini menggunakan data panel sebanyak 45 pengamatan. Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS). Teknik analisis yang digunakan adalah regresi moderasi (*moderated regression analysis*). Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa (1) Upah minimum, investasi, dan pengeluaran pemerintah berpengaruh secara simultan terhadap tingkat pengangguran Kabupaten/Kota di Provinsi Bali (2) Upah minimum, investasi, dan pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif dan signifikan secara parsial terhadap tingkat pengangguran Kabupaten/Kota di Provinsi Bali (3) Upah minimum memperkuat pengaruh investasi dan pengeluaran pemerintah terhadap tingkat pengangguran Kabupaten/Kota di Provinsi Bali

Kata Kunci: *upah minimum, investasi, pengeluaran pemerintah, tingkat pengangguran*

ABSTRACT

The high unemployment rate causes community to be unable maximize their welfare, this case in every area, which is in Bali Province. This study to analyze (1) the simultaneous effect of minimum wages, investment, and government spending on district / municipal unemployment rates Bali Province, (2) the partial effects of minimum wages, investment, and government spending on district / municipal unemployment rates Bali Province, (3) the role of minimum wages in moderating effect of investment and government spending on district / municipal unemployment rate Bali Province. This study uses panel data as 45 observations. The data source in this research is secondary data which comes from the Central Statistics Agency. The analysis technique used is moderated regression analysis. The results of the analysis, (1) Minimum wages, investment, and government spending have a simultaneous effect on the district / municipal unemployment rate Bali Province (2) Minimum wages, investment and government spending have a negative and partially significant effect on the district / municipal unemployment rate cities Bali Province (3) Minimum wage strengthens effect of investment and government the district / municipal unemployment rate Bali Province

Keywords: minimum wage, investment, government spending, unemployment rate

PENDAHULUAN

Pembangunan adalah sebuah proses perbaikan yang dilakukan secara terus menerus pada suatu masyarakat atau suatu sistem sosial secara keseluruhan untuk mencapai sebuah kehidupan yang lebih baik (Todaro, 2000). Pembangunan ekonomi sebuah negara dapat dilihat dari beberapa indikator perekonomian. Salah satu di antaranya adalah tingkat pengangguran. Berdasarkan tingkat pengangguran dapat dilihat kondisi suatu negara, apakah perekonomiannya berkembang atau lambat dan atau bahkan mengalami kemunduran.

Pemerintah sebagai pelaksana pembangunan membutuhkan manusia yang berkualitas sebagai modal dasar bagi pembangunan. Pemerintah diharapkan mampu memajukan pembangunan sosial ekonomi bagi penduduk setempat (Akudugu, 2012). Pertumbuhan ekonomi merupakan alat ukur untuk melihat dan menganalisis tingkat perkembangan perekonomian di suatu negara (Deprianto, dkk, 2011). Pertumbuhan ekonomi akan memberikan kontribusi yang positif apabila pemerintah pusat memberikan kewenangan yang tinggi kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan pengeluaran pemerintah melalui kebijakan desentralisasi fiskal (Zhang, 1998).

Pertumbuhan ekonomi juga berhubungan dengan proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat (Rimbawan, 2010). Pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat berarti produksi barang atau jasa yang dihasilkan meningkat. Dengan demikian diperlukan tenaga kerja semakin banyak untuk memproduksi barang atau jasa sehingga pengangguran berkurang (Yacoub, 2012). Tingkat pertumbuhan PDB ekonomi meningkatkan lapangan kerja dan mengurangi pengangguran (Kreishan, 2011). Pertumbuhan ekonomi akan membantu mengurangi tingkat pengangguran yang tinggi (Le dan Miller, 2000).

Pengangguran dapat terjadi sebagai akibat dari tingginya tingkat perubahan angkatan kerja yang tidak diimbangi dengan adanya lapangan pekerjaan yang cukup luas serta penyerapan tenaga kerja yang cenderung kecil persentasenya. Hal ini disebabkan rendahnya tingkat pertumbuhan penciptaan lapangan kerja untuk menampung tenaga kerja yang siap bekerja. Meningkatnya angka pengangguran disebabkan karena ketidakseimbangan pertumbuhan angkatan kerja dan penciptaan kesempatan kerja.

Adanya kesenjangan antara angkatan kerja dan lapangan kerja tersebut berdampak terhadap perpindahan tenaga kerja (migrasi) baik secara spasial antara desa-kota maupun secara sektoral. Hal ini sejalan dengan pernyataan Todaro (2000) yang menjelaskan bahwa terjadinya perpindahan penduduk disebabkan oleh tingginya upah atau pendapatan yang dapat diperoleh di daerah tujuan. Kesenjangan upah atau pendapatan yang besar antara desa atau daerah dan kota mendorong penduduk desa atau daerah untuk datang dan mencari pekerjaan di kota.

Tingkat pengangguran yang tinggi menyebabkan masyarakat tidak dapat memaksimalkan kesejahteraannya, sehingga keberhasilan pembangunan ekonomi suatu daerah dapat dilihat dari kondisi investasi dan pertumbuhan ekonomi. Provinsi Bali merupakan salah satu kawasan yang diakui sebagai kawasan kreatif di dunia (Chapain dan Comunian, 2006). Melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Baeti, 2012).

Salah satu penyebab ketidakmampuan ekonomi adalah status pengangguran yang tinggi. Menurut Sri Budhi (2008: 82) negara manapun di dunia ini baik yang dikategorikan negara maju maupun negara yang sedang berkembang senantiasa menghadapi masalah pengangguran, perbedaannya di negara berkembang tidak mampu memberikan tunjangan kepada warga negaranya

yang menganggur, sedangkan pada negara maju mampu memberikan jaminan itu.

Berikut disajikan tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Bali pada Tabel 1.

Tabel 1
Tingkat Pengangguran Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2014-2018

Tingkat Pengangguran Kabupaten/Kota di Provinsi Bali (Persen)					
Kabupaten/Kota	2014	2015	2016	2017	2018
Jembrana	2.95	1.59	1.59	0.67	1.38
Tabanan	2.25	1.73	1.73	1.79	1.43
Badung	0.48	0.34	1.34	0.48	0.44
Gianyar	1.43	1.93	1.93	1.02	1.60
Klungkung	1.94	1.39	1.39	0.94	1.41
Bangli	0.67	1.72	1.72	0.48	0.80
Karangasem	2.06	2.15	2.14	0.72	0.99
Buleleng	2.74	2.04	2.04	2.41	1.84
Denpasar	2.32	3.54	3.54	2.63	1.82
Provinsi Bali	1.90	1.99	1.89	1.48	1.37

Sumber: *BPS Provinsi Bali, 2020*

Data pada Tabel 1 menunjukkan bahwa tingkat pengangguran yang ada di Provinsi Bali tahun 2018 bervariasi antara 1.37 persen dengan Kabupaten Buleleng sebagai kabupaten dengan tingkat pengangguran paling tinggi yaitu 1.84 persen dan disusul oleh Kota Denpasar yaitu 1.82 persen, sedangkan kabupaten yang memiliki tingkat pengangguran terendah adalah Kabupaten Badung yaitu 0.44 persen. Tingkat pengangguran Kabupaten/Kota di Provinsi Bali secara umum terus mengalami fluktuasi yang cukup signifikan, dan diharapkan terjadi penurunan terhadap tingkat pengangguran setiap tahunnya.

Masalah pengangguran sangat penting untuk diperhatikan karena pengangguran sangat berpotensi menimbulkan kerawanan berbagai kriminal dan gejolak sosial, politik, dan kemiskinan (Cang dan Wu, 2012:4). Pengangguran dapat diartikan sebagai seseorang yang telah mencapai usia tertentu yang tidak memiliki pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan agar memperoleh upah atau keuntungan. Pengangguran umumnya disebabkan karena jumlah angkatan kerja

atau para pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang ada (Sukirno, 2004:327).

Semakin turunnya kesejahteraan masyarakat karena menganggur tentunya akan meningkatkan kemiskinan (Torruamet *et al.*, 2014). Tingkat pengangguran Kabupaten/Kota di Provinsi Bali bervariasi dan mengalami fluktuasi yang cukup signifikan setiap tahunnya, dimana indikator yang mempengaruhi tingkat pengangguran sendiri ialah upah minimum, investasi, dan pengeluaran pemerintah.

Upah adalah salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran. Upah merupakan kompensasi yang diterima oleh satu unit tenaga kerja yang berupa jumlah uang yang dibayarkan kepadanya (Gregory Mankiw, 2000:133-134). Penetapan tingkat upah yang dilakukan pemerintah pada suatu wilayah akan memberikan pengaruh terhadap besarnya tingkat pengangguran yang ada, semakin tinggi besarnya upah yang ditetapkan oleh pemerintah maka hal tersebut akan berakibat pada penurunan jumlah orang yang bekerja pada Negara tersebut.

Oleh karena itu semakin tinggi upah yang ditetapkan akan membawa pengaruh pada tingginya tingkat pengangguran yang terjadi (Kaufman dan Hotchkiss,1999). Hal ini dapat terjadi karena dengan semakin tinggi upah yang ditetapkan maka akan berpengaruh pada peningkatan biaya output yang harus dikeluarkan oleh suatu perusahaan. Akibatnya suatu perusahaan akan melakukan efisiensi terhadap produksi dengan cara mengurangi jumlah tenaganya.

Upah minimum adalah suatu faktor yang mempengaruhi jumlah pengangguran, jika dilihat dari pihak pemberi pekerjaan upah adalah beban perusahaan dimana penambahan upah minimum dapat menyebabkan pengurangan dalam permintaan tenaga kerja. Menurut Mankiw (2000: 140) upah merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran, karena naiknya upah minimum akan mengurangi permintan tenaga kerja yang akan

menimbulkan pengangguran, sedangkan dari pihak tenaga kerja upah adalah imbalan yang seharusnya diterima akibat balas jasa dari waktu dan tenaga yang digunakan, akibat penambahan upah minimum dapat menarik angkatan kerja untuk mau bekerja dan mencari pekerjaan.

Menurut Gilarso (2003), upah atau balas karya tenaga kerja ada dua segi yang penting, untuk pihak produsen, upah merupakan biaya produksi yang mesti ditekan serendah mungkin. Di sisi lain, untuk pihak pekerja atau buruh, upah merupakan sumber pendapatan bagi dirinya maupun keluarganya, dan dengan demikian juga menjadi sumber pembelanjaan masyarakat.

Upah menimbulkan masalah tersendiri bagi pemerintah dalam menentukan upah minimum yang di terima buruh. Apabila nilai upah tinggi maka penawaran akan tenaga kerja semakin tinggi namun permintaannya akan menurun, karena pengusaha tidak mampu untuk membayar gaji yang tinggi dan lebih memilih untuk mengurangi tenaga kerjanya. Sistem pengupahan yang telah banyak diterapkan di beberapa negara, yang pada dasarnya dapat dilihat dari dua sisi (Sulistiawati, 2012).

Pertama, upah minimum merupakan alat proteksi bagi pekerja untuk mempertahankan agar nilai yang diterima tidak menurun dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kedua, alat proteksi bagi perusahaan untuk mempertahankan produktivitas pekerja. Peningkatan upah minimum akan meningkatkan kebutuhan hidup yang layak sehingga standar hidup layak juga mengalami peningkatan.

Menurut teori klasik permintaan tenaga kerja tergantung pada upah, yaitu semakin rendah upah, semakin banyak permintaan tenaga kerja dalam suatu perekonomian. Proses terjadinya penempatan atau hubungan kerja melalui penyediaan permintaan tenaga kerja dinamakan pasar kerja. Permintaan tenaga

kerja atau kebutuhan tenaga kerja dalam suatu perkembangan ekonomi dapat dilihat dari kesempatan kerja (orang yang telah bekerja) dari setiap sektor atau kebutuhan tenaga kerja merupakan jumlah kesempatan kerja yang bersedia di dalam sistem ekonomi yang dinyatakan dalam jumlah satuan orang yang bekerja pada masing-masing sektor untuk melakukan kegiatan produksi.

Dalam arti yang lebih luas, kebutuhan ini tidak saja menyangkut jumlahnya, tetapi juga kualitasnya (pendidikan dan keahlian). Karena mereka yang bekerja tidak seluruhnya memiliki jam kerja normal (*full employment*), maka kebutuhan tenaga kerja dalam analisa-analisa tertentu juga dinyatakan dalam satuan ekivalen pekerja penuh (*full-time worker equipment*). Normatif yang digunakan untuk satu ekivalen pekerja penuh adalah 35 jam kerja per minggu, ada yang menggunakan 40 jam kerja per minggu, karena tiap-tiap sektor biasanya memiliki jumlah jam kerja yang berbeda, dan akan lebih baik lagi bila digunakan normatif yang juga berbeda antar sektor (Simanjuntak, 1998).

Permintaan terhadap tenaga kerja merupakan permintaan turunan (*Derived demand*) artinya jika permintaan terhadap suatu barang meningkat maka pengusaha akan menambah tenaga kerja untuk produksinya. Tenaga kerja yang diminta karena adanya perubahan ekonomi sehingga permintaan pun terus berubah. Pemakaian tenaga kerja juga tergantung pada perusahaan atau industri yang bersangkutan, jika perusahaan cenderung padat karya maka pemakaian atau penggunaan tenaga kerja meningkat namun jika perusahaan cenderung padat modal penggunaan tenaga kerja relatif kecil karena adanya pemakaian mesin sebagai salah satu faktor produksi.

Investasi merupakan sebagai pengeluaran untuk membeli barang-barang dan peralatan-peralatan produksi dengan tujuan untuk mengganti dan terutama menambah barang-barang modal dalam perekonomian yang akan digunakan untuk

memproduksi barang dan jasa di masa depan. Keberhasilan pembangunan di suatu daerah disamping ditentukan oleh besarnya pengeluaran pemerintah tersebut juga dipengaruhi oleh besarnya investasi. Investasi merupakan salah satu pilar pertumbuhan ekonomi. Investasi dapat menjadi titik tolak bagi keberhasilan dan keberlanjutan pembangunan di masa depan karena dapat menyerap tenaga kerja, sehingga dapat membuka kesempatan kerja baru bagi masyarakat yang pada gilirannya akan berdampak terhadap peningkatan pendapatan masyarakat (Sajafii, 2009).

Menurut Samuelson (2004: 198), investasi meliputi penambahan stok modal atau barang disuatu negara, seperti bangunan peralatan produksi, dan barang-barang inventaris dalam waktu satu tahun. Investasi merupakan langkah mengorbankan konsumsi di waktu mendatang. Dalam jangka panjang pertumbuhan investasi berpengaruh pada bertambahnya stok capital dan selanjutnya menaikkan produktivitas. Di negara yang tingkat penganggurannya tinggi, seperti Indonesia sekarang, angkatan kerja yang menganggur dapat dimanfaatkan sebagai sumber pembentukan modal.

Investasi adalah pengeluaran atau pembelanjaan penanaman modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-perengkapan produksi untuk menambah kemampuan produksi barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian. Pertambahan jumlah barang modal ini memungkinkan perekonomian untuk menghasilkan lebih banyak barang dan jasa di masa yang akan datang. Adakalanya penanaman modal dilakukan untuk menggantikan barang-barang modal lama yang harus didepresiasi (Sukirno, 2008:121).

Investasi memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan tingkat produktivitas (Aurangzeb, 2012). Di dalam

neraca nasional atau struktur Produk Domestik Bruto (PDB) menurut penggunaannya investasi didefinisikan sebagai pembentukan modal tetap domestik (*domestic fixed capital formation*) (Fatimah, 2007). Investasi dapat diartikan sebagai kata kunci penentu laju pertumbuhan ekonomi, karena disamping akan mendorong kenaikan output secara signifikan, juga secara otomatis akan meningkatkan permintaan input, sehingga pada gilirannya akan meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan masyarakat sebagai konsekuensi dari meningkatnya pendapatan yang diterima masyarakat (Makmun dan Yasin, 2003).

Manfaat investasi yakni produktivitas yang lebih tinggi dan lebih banyak pendapatan bagi pemerintah melalui pajak, peningkatan kemampuan neraca pembayaran, menciptakan lapangan kerja, modernisasi, dan pengembangan industri terkait (Osinubi dkk, 2010). Menurut Kunle *et al.*, (2014) pertumbuhan ekonomi secara langsung berkaitan dengan arus masuk investasi asing. Dalam jangka panjang pertumbuhan investasi berpengaruh pada bertambahnya stok capital dan selanjutnya menaikkan produktivitas.

Di negara yang tingkat penganggurannya tinggi, seperti Indonesia sekarang, angkatan kerja yang menganggur dapat dimanfaatkan sebagai sumber pembentukan modal. Investasi merupakan kunci dan memberikan kontribusi yang baik terhadap pertumbuhan ekonomi karena mampu meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan masyarakat (Thomas, 2015). Meningkatnya kegiatan investasi atau penanaman modal dalam negeri atau asing di suatu daerah diharapkan akan berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat, dimana dengan adanya kegiatan investasi tersebut dapat menyerap banyak tenaga kerja dan mengurangi angka pengangguran, sehingga masyarakat memiliki pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Sumanto (dalam Royan, dkk.,2015) menyatakan bahwa masyarakat yang sebelumnya menjadi pengangguran, akan mendapatkan pekerjaan dan pendapatan dengan adanya kegiatan investasi. Adapun beberapa faktor yang dapat menentukan minat para investor untuk berinvestasi di suatu daerah selain potensi sumber daya alam yang menarik ialah kondisi lingkungan sekitar seperti infrastruktur, pendidikan, dan angka korupsi suatu daerah (Lindblad, 2015).

Pengeluaran pemerintah juga menjadi salah satu indikator yang mempengaruhi tingkat pengangguran. Pengeluaran pemerintah sendiri merupakan alat intervensi pemerintah terhadap perekonomian yang dianggap paling efektif (Samuelson & Nordhaus, 2001). Belanja publik untuk modal dan pendidikan adalah investasi yang mampu merangsang pertumbuhan. Namun permasalahan terjadi ketika alokasi pengeluaran pemerintah yang dikeluarkan melalui belanja public kurang menyentuh masyarakat, hal ini disebabkan oleh adanya ketimpangan distribusi alokasi pengeluaran pemerintah kabupaten/kota.

Selama ini, tingkat efektifitas pengeluaran pemerintah dapat diukur melalui seberapa besar pertumbuhan ekonomi. Pengeluaran Pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Teori mengenai pengeluaran pemerintah dapat digolongkan menjadi dua bagian, yaitu teori makro dan teori mikro (Guritno, 1999).

Dalam kaitan itu Wagner menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah dan kegiatan pemerintah semakin lama semakin meningkat. Tendensi ini oleh Wagner disebut dengan hukum selalu meningkatnya peranan pemerintah. Inti teorinya yaitu semakin meningkatnya peran pemerintah dalam kegiatan dan kehidupan ekonomi masyarakat sebagai suatu keseluruhan. Wagner menyatakan bahwa

dalam suatu perekonomian apabila pendapatan per kapita meningkat maka secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat terutama disebabkan karena pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul dalam masyarakat, hukum, pendidikan, rekreasi, kebudayaan, dan sebagainya (Mangkoesobroto, 2001).

Menurut Mardiasmo (2005), “Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah” merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi Pemerintah Daerah. Sebagai instrumen kebijakan, anggaran daerah menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas. Anggaran daerah digunakan sebagai alat untuk menentukan besar pendapatan dan pengeluaran, membantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, otorisasi 28 pengeluaran di masa-masa yang akan datang, sumber pengembangan ukuran-ukuran standar untuk evaluasi kinerja, alat untuk memotivasi para pegawai, dan alat koordinasi bagi semua aktivitas dari berbagai unit kerja”.

Pengangguran menyebabkan hilang atau berkurangnya keterampilan dan pengangguran juga menimbulkan ketidakstabilan sosial dan politik (Nanga, 2005). Tingkat pengangguran dapat memberikan gambaran sesungguhnya mengenai kesehatan ekonomi suatu Negara. Tingkat pengangguran merupakan indikator yang biasa digunakan oleh pelaku pasar valuta asing untuk menganalisis sehat atau tidaknya perekonomian suatu Negara. Rendahnya tingkat pengangguran menunjukkan semakin sehatnya perekonomian Negara.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut; 1) Untuk menganalisis pengaruh simultan upah minimum, investasi, dan pengeluaran pemerintah terhadap tingkat pengangguran Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. 2) Untuk menganalisis pengaruh parsial upah minimum, investasi, dan pengeluaran pemerintah terhadap tingkat pengangguran Kabupaten/Kota di Provinsi Bali 3) Untuk menganalisis peran upah minimum

dalam memoderasi pengaruh investasi dan pengeluaran pemerintah terhadap tingkat pengangguran Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.

METODE PENELITIAN

Lokasi wilayah penelitian ini adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali, yang mencakup sembilan kabupaten/kota yaitu, Kabupaten Jembrana, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Bangli, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Buleleng, dan Kota Denpasar. Alasan pemilihan lokasi ini adalah Provinsi Bali dikenal sebagai destinasi pariwisata yang sangat indah dan memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi namun masih juga terdapat tingkat pengangguran. Provinsi Bali sebagai lokasi penelitian adalah untuk melihat bagaimana pengaruh upah minimum, investasi, dan pengeluaran pemerintah terhadap tingkat pengangguran.

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif, yaitu data yang berbentuk angka-angka yang dapat dihitung dengan satuan hitung, sedangkan data kualitatif adalah data yang berupa penjelasan-penjelasan atau uraian-uraian Sugiyono (2017:10). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Titik pengamatan dalam penelitian ini adalah 45 pengamatan dengan mengkombinasikan data *time series* dan *cross section*.

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode observasi yang merupakan metode pengumpulan data yang telah tersedia oleh badan atau lembaga tertentu, di mana peneliti tidak terlibat langsung (Sugiyono, 2014:247). Pengumpulan data ini dilakukan dengan cara mengamati, mencatat, dan mempelajari uraian dari karya ilmiah seperti, artikel, dan dokumen. Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi moderasi (*moderating regression analysis*).

Teknik analisis regresi moderasi atau *moderating regression analysis* (MRA) digunakan untuk mengetahui peran suatu variabel moderating akan dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen (Suyana Utama, 2009: 147).

Persamaan secara matematis sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3M + \beta_4X_1M + \beta_5X_2M + e \dots\dots\dots(1)$$

Keterangan:

Y = Tingkat Pengangguran

α = Konstanta

X1 = Investasi

X2 = Pengeluaran Pemerintah

M = Upah Minimum

β_1 = Koefisien regresi dari Investasi (X_1)

β_2 = Koefisien regresi dari Pengeluaran Pemerintah (X_2)

β_3 = Koefisien regresi dari Upah Minimum (M)

β_4 = Koefisien regresi dari interaksi Investasi dan Upah Minimum (X_1M)

β_5 = Koefisien regresi dari interaksi Pengeluaran Pemerintah dan Upah Minimum (X_2M)

e = error

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Deskripsi variabel penelitian menyampaikan informasi mengenai karakteristik variabel-variabel penelitian yang terdiri dari jumlah pengamatan, nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata dan standar deviasi. Tabel 2 memperlihatkan hasil analisis statistik deskriptif.

Tabel 2
Hasil Uji Statistik Deskriptif

N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
---	---------	---------	------	-------------------

Upah Minimum	45	1.542.600	2.499.581	189.943.217	258.720.004
Investasi	45	156.520.000.00	706.580.800.0000	1.662.511.774.138	2.138.167.222.788
Pengeluaran Pemerintah	45	793.647.679.000	542.000.929.8000	1.792.823.922.533	103.836.131.8425
Tingkat Pengangguran	45	1.90	37.51	11.1118	9.53793
Valid N (listwise)	45				

Sumber: *Data diolah, 2020*

Data pada Tabel 2 mendeskripsikan bahwa jumlah total data (N) ada 45 data. Variabel upah minimum memiliki nilai minimum Rp 1.542.600, nilai maksimum Rp 2.499.581 dengan rata-rata Rp 189.943.217 dan standar deviasi sebesar Rp 258.720.004. Variabel investasi memiliki nilai minimum Rp 156.520.000.00 milyar, nilai maksimum Rp 706.580.800.0000 milyar dengan rata-rata Rp 1.662.511.774.138 milyar, dan standar deviasi sebesar Rp 2.138.167.222.788 milyar. Variabel pengeluaran pemerintah memiliki nilai minimum Rp 793.647.679.000 juta, nilai maksimum Rp 542.000.929.8000 juta dengan rata-rata Rp 1.792.823.922.533 juta, dan standar deviasi sebesar Rp 103.836.131.8425 juta. Variabel tingkat pengangguran memiliki nilai minimum 1.90 persen, nilai maksimum 37.51 persen dengan rata-rata 11.1118 persen, dan standar deviasi 9.53793 persen.

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan dengan tujuan untuk memastikan hasil yang diperoleh memenuhi asumsi dasar di dalam analisis regresi. Hasil uji asumsi klasik yang dilakukan dalam penelitian ini adalah uji normalitas dan uji heteroskedastisitas. Hasil dari uji asumsi klasik yang diolah dengan bantuan *software* SPSS 18.0 disajikan sebagai berikut:

1) Hasil Uji Normalitas

Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah residual dari model regresi yang dibuat berdistribusi normal atau tidak. Untuk menguji apakah data yang digunakan normal atau tidak dapat dilakukan dengan menggunakan uji *Kolmogorov Smirnov*. Apabila koefisien *Asymp. Sig. (2-tailed)* lebih besar dari 0,05 maka data tersebut dikatakan berdistribusi normal.

Tabel 3
Hasil Uji Normalitas

<i>Unstandardized Residual</i>	
N	45
<i>Kolmogorov-Smirnov Z</i>	1,945
<i>Asymp.Sig.(2-tailed)</i>	0,104

Sumber: *Data diolah, 2020*

Berdasarkan Tabel 3 dapat dilihat bahwa nilai *Kolmogorov Smirnov* (K-S) sebesar 1,945 , sedangkan nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,104. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa model persamaan regresi tersebut berdistribusi normal karena nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* 0,104 lebih besar dari nilai *alpha* 0,05.

2) Hasil Uji Multikolinieritas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam satu model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya korelasi antar variabel bebas dapat dilihat dari nilai tolerance dan nilai *variance inflation factor* (VIF). Jika nilai tolerance lebih dari 10% atau VIF Kurang dari 10, maka dapat dikatakan model telah bebas dari multikolinearitas. Adapun hasil uji multikol dapat dilihat pada Tabel 4 sebagai berikut:

Tabel 4
Hasil Uji Multikoleniaritas

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
Upah Minimum	0,743	1,346	Bebas multikolinieritas
Investasi	0,861	1,162	Bebas multikolinieritas
Pengeluaran Pemerintah	0,655	1,526	Bebas multikolinieritas

Sumber: *Data diolah, 2020*

Berdasarkan Tabel 4 dapat dilihat bahwa nilai *tolerance* dan VIF dari seluruh variable tersebut menunjukkan bahwa nilai *tolerance* untuk setiap variabel lebih besar dari 10% dan nilai VIF lebih kecil dari 10 yang berarti model persamaan regresi bebas dari multikolinearitas

3) Hasil Uji Autokorelasi

Suatu model regresi jika mengandung gejala autokorelasi, maka prediksi yang dilakukan dengan model tersebut akan tidak baik, atau dapat memberikan hasil prediksi yang menyimpang. Uji autokorelasi dalam penelitian ini dilakukan dengan Uji Durbin-Watson (DW-test) atau *d* statistik terhadap variabel pengganggu (*disturbance error term*).

Tabel 5
Hasil Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.349 ^a	.122	.058	.96295661	2.051

Sumber: *Data diolah, 2020*

Berdasarkan Tabel 5 dapat dilihat bahwa nilai DW 2,051 nilai ini bila dibandingkan dengan nilai tabel signifikansi 5%, jumlah sampel 45 (n) dan jumlah variabel independen (K=3) maka diperoleh nilai *du* 1,6662. Nilai DW 2,051 lebih

dari batas atas (du) yakni 1,6662 dan kurang dari (4-du) $4-1,6662 = 2,3338$, maka dapat disimpulkan bahwa data sudah lolos uji autokorelasi dengan menggunakan Durbin Watson test.

4) Hasil Uji Heteroskedastisitas

Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain yang dilakukan dengan uji *Glejser*. Jika tidak ada satu pun variabel bebas yang berpengaruh signifikan terhadap nilai *absolute residual* atau nilai signifikansinya di atas 0,05 maka tidak mengandung gejala heteroskedastisitas. Adapun hasil uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 6 berikut:

Tabel 6
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	.080	.029		2.695	.103
Upah Minimum	-.094	.036	-.445	-2.650	.116
Investasi	-.097	.079	-.456	-1.218	.231
Pengeluaran Pemerintah	.009	.038	.040	.228	.821
X1.X2	-.087	.083	-.416	-1.053	.299
X1.X3	-.042	.055	-.199	-.756	.454

Sumber: *Data diolah, 2020*

Pada Tabel 6 dapat dilihat bahwa nilai signifikansi dari seluruh variabel memiliki nilai yang lebih besar dari 0,05 yang berarti tidak terdapat pengaruh antara variabel bebas terhadap *absolute residual*. Dengan demikian, model yang dibuat tidak mengandung gejala heteroskedastisitas.

Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien determinasi (R²) digunakan untuk mengetahui dan mengukur kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Peneliti menggunakan nilai *adjusted R²* pada saat mengevaluasi yang mana model regresi

terbaik, karena tidak seperti R^2 , nilai *adjusted* R^2 dapat naik atau turun apabila satu variabel independen ditambahkan ke dalam model. Hasil uji koefisien determinasi dapat dilihat dalam Tabel 7 berikut:

Tabel 7
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.997 ^a	.994	.993	.08084506

Sumber : *Data diolah, 2020*

Hasil uji memberikan hasil dimana diperoleh besarnya *adjusted* R^2 (koefisien determinasi yang telah disesuaikan) pada Tabel 7 adalah 0,993. Ini berarti variasi tingkat pengangguran dapat dipengaruhi secara signifikan oleh variabel upah minimum, investasi, dan pengeluaran pemerintah, interaksi investasi dengan upah minimum dan variabel interaksi pengeluaran pemerintah dengan upah minimum sebesar 99,3 persen.

1) Pengaruh simultan upah minimum, investasi, dan pengeluaran pemerintah terhadap tingkat pengangguran Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.

Berdasarkan hasil perhitungan uji F pada regresi moderasi maka diperoleh hasil pengaruh secara simultan dari masing–masing upah minimum, investasi, dan pengeluaran pemerintah terhadap tingkat pengangguran Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.

Tabel 8
Hasil Uji Simultan (Uji F)

Model	Sum Of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	43.049	5	8.610	1317.294	.000 ^a
Residual	.255	39	.007		
Total	43.304	44			

Sumber : *Data diolah, 2020*

Berdasarkan hasil analisis regresi secara simultan pada Tabel 8 maka

diketahui bahwa F hitung adalah sebesar 1317,294 dengan signifikansi sebesar 0,000 yang berarti nilai signifikansi F (0,000) lebih kecil dari 0,05 dan F hitung (1317,294) lebih besar dari F tabel (2,48) maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upah minimum, investasi, dan pengeluaran pemerintah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.

2) Pengaruh parsial upah minimum, investasi, dan pengeluaran pemerintah terhadap tingkat pengangguran Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.

Berdasarkan hasil dari analisis regresi moderasi maka diperoleh hasil pengaruh secara parsial pengaruh yang disajikan pada Tabel 9.

Tabel 9
Hasil Uji Parsial (Uji T)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-.016	.012		-1.329	.192
Upah Minimum	-.183	.015	-.183	-12.439	.000
Investasi	-.174	.033	-.173	-5.300	.000
Pengeluaran Pemerintah	-.281	.016	-.276	-17.917	.000
X1.X2	-.167	.034	-.168	-4.870	.000
X1.X3	-1.103	.023	-1.112	-48.277	.000

Sumber : *Data diolah, 2020*

Berdasarkan hasil analisis regresi moderasi diatas, maka persamaan strukturalnya adalah sebagai berikut :

$$\hat{Y} = -0,016 - 0,183X_1 - 0,174X_2 - 0,281X_3 - 0,167X_1.X_2 - 1,103X_1.X_3 + \varepsilon$$

Berdasarkan hasil analisis pengaruh upah minimum terhadap tingkat pengangguran diperoleh nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ dengan nilai koefisien regresi negatif sebesar -0,183. $t_{hitung} = -12.439 > 1,680$ berarti bahwa upah minimum secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Menurut (Mankiw, 2000:129),

bahwa alasan adanya pengangguran merupakan gagalnya upah yang melakukan penyesuaian sampai penawaran tenaga kerja sama dengan permintaannya. Upah yang rendah mendorong perusahaan lebih banyak menggunakan tenaga kerja sehingga dapat mengurangi pengangguran.

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa dengan naiknya upah minimum dapat mempengaruhi jumlah pengangguran Kabupaten/Kota di Provinsi Bali dimana pengaruhnya negatif, berarti dengan meningkatnya upah maka dorongan untuk mencari pekerjaan/bekerja oleh penduduk semakin banyak sehingga dapat mengurangi jumlah pengangguran, kenaikan upah tiap tahun di Bali tidak banyak mempengaruhi dalam permintaan tenaga kerja. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Sirait dan Marhaeni (2013), dimana dalam penelitiannya yang menyatakan bahwa upah minimum regional berpengaruh negatif signifikan terhadap pengangguran Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Jadi dengan meningkatnya upah maka dorongan untuk mencari kerja oleh penduduk semakin meningkat dan dapat mengurangi jumlah pengangguran, kenaikan upah tiap tahun di Kabupaten/Kota di Provinsi Bali tidak banyak mempengaruhi dalam permintaan tenaga kerja.

Berdasarkan hasil analisis pengaruh investasi terhadap tingkat pengangguran diperoleh nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ dengan nilai koefisien regresi negatif sebesar $-0,174$. $t_{hitung} = -5,300 > 1,680$ berarti bahwa investasi secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Menurut Teori Harrod Domar, yang dalam teorinya berpendapat bahwa investasi tidak hanya menciptakan permintaan, tetapi juga memperbesar kapasitas produksi. Artinya dengan semakin besar kapasitas produksi maka akan membutuhkan tenaga kerja yang semakin besar pula.

Penelitian ini mendapatkan hasil bahwa investasi dibagi menjadi dua bagian yaitu penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan penanaman modal asing (PMA). Menurut Kurniawan (2010:8) dalam penelitiannya menyatakan bahwa investasi berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran. Hal ini berarti disaat investasi meningkat satu satuan, maka tingkat pengangguran akan menurun sebesar satu satuan. Selain itu juga sesuai dengan penelitian dari Afrida (2003), yang menyatakan bahwa pengeluaran investasi memberikan peluang untuk tumbuhnya kesempatan kerja, bila permintaan terhadap barang dan jasa lesu, maka pada gilirannya timbul pula kelesuan pada permintaan tenaga kerja.

Berdasarkan hasil analisis pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap tingkat pengangguran diperoleh nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ dengan nilai koefisien regresi negatif sebesar $-0,281$. $t_{hitung} = -17,917 > 1,680$ berarti bahwa pengeluaran pemerintah secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Hal ini berarti disaat berkurangnya pengeluaran pemerintah, pengangguran semakin meningkat. Berkurangnya pengeluaran pemerintah menyebabkan tingkat pengangguran menjadi naik. Pengeluaran pemerintah sendiri merupakan alat intervensi pemerintah terhadap perekonomian yang dianggap paling efektif. Selama ini, tingkat efektifitas pengeluaran pemerintah dapat diukur melalui seberapa besar pertumbuhan ekonomi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Hasil penelitian Muhammad Dony (2016) menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran, artinya semakin berkurang pengeluaran

pemerintah, pengangguran semakin meningkat. Berkurangnya pengeluaran pemerintah menyebabkan tingkat pengangguran terbuka menjadi naik. Nilai koefisien parameter masing-masing pengeluaran ini bersifat inelastis, di mana persentase penurunan dalam tingkat pengangguran lebih kecil dari pada persentase peningkatan dalam pengeluaran pemerintah. Dengan demikian kinerja pemerintah dalam mengalokasikan pengeluaran tersebut belum baik.

3) Peran upah minimum dalam memoderasi pengaruh investasi dan pengeluaran pemerintah terhadap tingkat pengangguran Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.

Berdasarkan hasil analisis regresi moderasi menunjukkan bahwa tingkat pengangguran dapat dipengaruhi secara signifikan oleh variabel investasi, pengeluaran pemerintah, upah minimum, interaksi investasi dengan upah minimum dengan nilai koefisien regresi variabel interaksi $X_1.X_2$ negatif sebesar -0,167 dan variabel interaksi pengeluaran pemerintah dengan upah minimum sebesar nilai koefisien regresi variabel interaksi $X_1.X_3$ negatif sebesar -1,103, yang menandakan bahwa upah minimum memperkuat pengaruh investasi dan pengeluaran pemerintah terhadap tingkat pengangguran Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.

Tenaga kerja yang menetapkan tingkat upah minimumnya pada tingkat upah tertentu, jika seluruh upah yang ditawarkan besarnya dibawah tingkat upah tersebut, seseorang akan menolak mendapatkan upah tersebut dan akibatnya menyebabkan pengangguran. Jika upah yang ditetapkan pada suatu daerah terlalu rendah, maka akan berakibat pada tingginya jumlah pengangguran yang terjadi pada daerah tersebut (Sulistiawati, 2012).

Pada variabel yang telah dipengaruhi moderasi memperkuat, variabel upah minimum, investasi, dan pengeluaran pemerintah menunjukkan pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran. Penambahan variabel moderator

terbukti dapat memperbaiki model sebelumnya menjadi lebih baik, dengan berubahnya nilai probabilitas variabel upah minimum, investasi, dan pengeluaran pemerintah yang dalam model sebelumnya tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa variabel upah minimum merupakan variabel moderasi yang memperkuat pengaruh negatif investasi dan pengeluaran pemerintah terhadap tingkat pengangguran Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.

SIMPULAN

- 1) Secara simultan Upah Minimum, Investasi, dan Pengeluaran Pemerintah berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,993 mempunyai arti bahwa sebesar 99,3 persen variasi Tingkat Pengangguran dapat dipengaruhi secara signifikan oleh variabel Upah Minimum, Investasi, dan Pengeluaran Pemerintah sedangkan sisanya sebesar 0,7 persen dijelaskan oleh faktor-faktor lain.
- 2) Secara parsial Upah Minimum, Investasi, dan Pengeluaran Pemerintah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.
- 3) Upah Minimum memperkuat pengaruh Investasi dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Tingkat Pengangguran Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.

SARAN

Berdasarkan hasil analisis dan simpulan yang telah disajikan, maka dapat diberikan saran sebagai berikut:

- 1) Pemerintah perlu memberi perhatian yang lebih terkait tingkat pengangguran Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Sinerginya informasi dan kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diharapkan dapat lebih

mengoptimalkan hasil yang diharapkan untuk mengurangi tingkat pengangguran di seluruh di Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.

- 2) Upah minimum pada setiap Kabupaten/Kota di Provinsi Bali lebih baik jika pemerintah daerah memberikan keadilan jumlah upah minimum yang sebanding dengan potensi dari daerah tersebut. Pemerintah diharapkan jangan hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi saja, tetapi pada pertumbuhan ekonomi yang berorientasi padat karya dan pro rakyat, dan tidak melakukan peningkatan upah yang secara pesat walaupun berpengaruh negatif karena akan mempengaruhi permintaan tenaga kerja.
- 3) Pemerintah daerah perlu mengalokasikan dana investasi dan pengeluaran pemerintah ke sektor-sektor yang lebih produktif karena dengan demikian mampu memperluas kesempatan kerja di Provinsi Bali dan mampu mengurangi tingkat pengangguran di Provinsi Bali. Di samping itu pemerintah juga harus memiliki komitmen dalam menetapkan segala kebijakannya agar berpihak kepada masyarakat, sehingga investasi dan pengeluaran pemerintah mampu menyerap tenaga kerja dan mampu mengurangi tingkat pengangguran Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.

REFRENSI

- Aboy Kurniawan, Adnan Haris Musa, dan Rachmad Budi Suharto. 2017. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran di Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Akuntansi*. Vol 19 (2), hal. 131-136.
- Akudugu, Jonas Ayaribilla. 2012. Accountabillity in local Government revenue management: who does what?. *Journal of Sustainable Development*. 2(2).
- Cang, Juin-jen dan Wu, Chi-Hsin. 2012. Crime, Job Searches, and Economic Growth, *International Atlantic Economic Society*, pp:1-20.
- Cahya Ningsih, Bagus Indrajaya. 2015. Pengaruh Modal dan Tingkat Upah Terhadap Nilai Produksi Serta Penyerapan Tenaga Kerja Pada Industri Kerajinan Perak. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan* Vol. 8 No. 1.
- Gilarso, 2003. *Pengantar ilmu Ekonomi Mikro*. Penerbit Kanisius. Yogyakarta.

- Inna Dariwardani, Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. 2014. Analisis Dinamika Kemiskinan (Poverty Dynamics) di Bali Berdasarkan Data Susenas Panel 2008– 2010. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan* Vol. 7 No. 1
- Kembar Sri Budhi. 2013. Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Pengentasan Kemiskinan di Bali: Analisis FEM Data Panel. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*. Vol. 6 No. 1.
- Lewis Carol W. and W. Barthley Hildreth. (2012). *Budgeting Politics and Power*, 2nd. *Journal Oxford University Press*.
- Le, A.T., Miller, P.W. 2000. Australia's Unemployment Problem Economic: *Economic Record*,76 (232), 74-104.
- Lin, Say. 1994. Government Spending and Economic Growth. *Journal Economic*.26:8394.
- Lindblad, J. Thomas. 2015. Foreign Direct Investment In Indonesia : Fifty Years Of Discourse. *Bulletin Of Indonesian Economic Studies*, 51 (2) : 217-273.
- Mankiw, N. Gregory. 2000. *Pengantar Ekonomi* . Jakarta: Erlangga.
- Marhaeni, A.A.I.N. dan Manuati Dewi, I.G.A. 2004. *Buku Ajar Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Fakultas Ekonomi Universitas Udayana.
- Marielle, Monteils. 2010. The Analysis Of The Relation Between Education and Economic Growth. *Journal Of Comparative and International Education*, 34(1).
- Mehrara, Mohsen, Mosayeb Pahlavani, and Yoursef Elyasi. 2011. Government Revenue and Government Expenditure Nexus in Asian Countries: Panel Cointegration and Causality. *International Journal of Business and Social science*, 2(7), pp: 199-207.
- Muhammad Taufik, Fitriadi. 2014. Pengaruh Investasi Dan Ekspor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Penyerapan Tenaga Kerja Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan* Vol. 7 No. 2.
- Norton, Seth. 2002. Economic Growth and Poverty: *In Seacrch of Trickle-Down*. *Cato Journal*, 22(2), pp. 263-275.
- Rio Maggi, Dian Saraswati. 2013. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Inflasi di Indonesia: Model Demand Pull Inflation. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan* Vol. 6 No. 2.
- Samuelson, Paul A dan William D.Nordhaus.1996. *Makro Ekonomi (terjemahan)*. Edisi keempatbelas, Erlangga,Jakarta
- Sangadji, E.M. dan Sopiah. 2010. Prilaku Konsumen: Pendekatan PraktisDisertai: Himpunan Jurnal Penelitian. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Sarah Xue Dong, Chris Manning. 2017. Labour-Market Developments at a Time of Heightened Uncertainty. *Bulletin of Indonesian Economic Studies* Vol.53,No.1.

- Seviteni, Louis Nkwatoh. 2012. Government Expenditure and Economic Growth In Negeria: *An Empirical Investigation (1961-2009)*. *The Journal of Economic Analysis*, 3(1), pp: 38-51.
- Sirait, Nolvina dan A A I N Marheni. 2013. Analisis Beberapa Faktor yang Berpengaruh Terhadap Jumlah Pengangguran Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*. 2 (2). Hal:108-118
- Sulistiawati & Rini. (2012). Pengaruh Upah Minimum Penyerapan Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Sosial*. Volume 8. Nomor 3, Hal: 195-211.
- Thee Kian Wie dan Siwage Dharma Negara. 2010. *Survey of Recent Developments*. *Bulletin of Indonesian Economic Studies* Vol.46, No. 3.
- Thomas, Linblad. 2015. Foreign Direct Investment In Indonesia: Fifty Years Of Discourse. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 51(2).
- Touny, M. A. 2013. Investigate The Long-Run Trade-Off Between Inflation and Unemployment in Egypt. *International Journal of Economics and Finance*, 5(7), 115-125
- Todaro, Michael P, 2000, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, Trans , Haris Munandar , Jakarta , Erlangga.
- Vidyattama, Yogi. 2004. The Financial Development, Investment and Economic Growth. *Jurnal Ekonomi dan Pendidikan* 1 (1): 37-49.
- Wahyuni, I Gusti Ayu Putri.2014. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kesenjangan Pendapatan Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. Vol. 03.No.08.
- Wirawan. (2015). *Manajemen Sumber Daya Manusia Indonesia*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Zhang, T., and Zou, H.-f. (1998). Fiscal decentralization, public spending, and economic growth in China. *Journal of Public Economics* 67 (1998),hal.221-240.
- Zouhaier, Hadhek. 2012. *Institutions, Investment and Economic Growth*. *International Journal of Economics and Finance*.Vol. 4, No. 2, 152-162.
- Zlatko, Bezhovski. 2016. The Future of the Mobile Payment as Electronic Payment System. *European Journal of Business and Management*. 8 (8), page 127-132.